

**PENEMPATAN JABATAN STRUKTURAL BERBASIS KOMPETENSI  
DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH**

Rizki Munandar

NPP. 29.0060

*Asdaf Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh*

*Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik*

Email: rizkymunandarr3@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** Competence is one of the basics in placing employees in a certain position. Placement in structural positions must take into account the competence of the employee. The title of this research is “Competency-Based Structural Position Positioning at the Agency for Personnel and Human Resources Development in Aceh Besar District, Aceh Province”. **Purpose:** The research problem aims to find out any indications of inappropriate position placement. This study also aims to find out how the implementation of structural positioning in BKPSDM Aceh Besar Regency and what are the inhibiting factors and efforts made in overcoming these problems. **Method:** The research method used is qualitative research, with descriptive methods and inductive approaches. As for the data collection techniques using interviews, observation and documentation. Then for the data analysis technique the author uses data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Result:** The results showed that the placement of structural positions in BKPSDM Aceh Besar District, Aceh Province was still not in accordance with competence. **Conclusion:** The obstacles are the limited number of employees who have the required competencies and the unfulfilled implementation of training for structural officials. Efforts are being made to overcome these problems by increasing the competence of structural officials through education and training and optimizing supervision in the context of employee development to be used in determining the planning of training needs. The researcher's suggestion is to recommend immediately optimizing leadership training and conducting technical training for employees at the Aceh Besar District BKPSDM and immediately reallocating the budget for training purposes so that structural officials at the Aceh Besar District BKPSDM can fulfill one of the requirements in occupying a position.

**Keywords:** placement, structural position, competence

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kompetensi merupakan salah satu dasar dalam penempatan pegawai pada suatu jabatan tertentu. Penempatan dalam jabatan struktural harus memperhatikan kompetensi dari pegawai tersebut. Penelitian ini berjudul “Penempatan Jabatan Struktural Berbasis Kompetensi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh”. Permasalahan yang diteliti bertujuan untuk mengetahui adanya indikasi penempatan jabatan yang tidak sesuai. **Tujuan:** Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penempatan jabatan struktural di BKPSDM Kabupaten Aceh Besar serta apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian untuk Teknik analisis data penulis menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan jabatan struktural di BKPSDM Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh masih belum sesuai dengan kompetensi. **Kesimpulan:** Adapun hambatan adalah terbatasnya pegawai yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan pelaksanaan diklat yang belum terpenuhi bagi pejabat struktural. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah meningkatkan kompetensi pejabat struktural melalui pendidikan dan pelatihan serta mengoptimalkan pengawasan dalam rangka pembinaan pegawai untuk digunakan dalam penetapan perencanaan kebutuhan diklat. Saran peneliti adalah Merekomendasikan agar segera mengoptimalkan diklat kepemimpinan dan melakukan diklat teknis terhadap pegawai yang ada di BKPSDM Kabupaten Aceh Besar dan segera melakukan realokasi anggaran untuk keperluan diklat agar pejabat struktural yang ada di BKPSDM Kabupaten Aceh Besar dapat memenuhi salah satu syarat dalam menduduki suatu jabatan. **Kata kunci:** penempatan, jabatan struktural, kompetensi

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang menjalankan pemerintahannya dengan sistem demokrasi yang juga menerapkan sistem pemerintahan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk tindakan dalam mewujudkan *good governance*. Tujuannya ialah melakukan pembaruan serta transformasi fundamental dalam struktur penyelenggaraan tata kelola pemerintahan terpenting dari sisi Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan aparatur di dalamnya yang mempunyai integritas serta kompetensi. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang diterima oleh pemerintah pusat dan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan daerah termasuk sumber daya aparaturnya yakni ASN. Sistem merit yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan strategi dan manajemen ASN dimana dalam suatu jabatan setiap ASN berhak untuk mendudukinya dengan syarat memiliki

kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki serta menerapkan sistem keadilan. Adanya sistem merit setiap pegawai dapat memiliki kesempatan bersaing mendapatkan jabatan. Kompetensi merupakan faktor penting yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi. Dengan adanya kompetensi setiap aparatur dapat bersaing kuat dalam persaingan menduduki jabatan-jabatan tertentu sehingga pola karier yang dimiliki akan terus berkembang dan maju. Penempatan Pegawai adalah langkah-langkah kegiatan yang dilakukan untuk mendudukkan seseorang pegawai yang tepat ke posisi tertentu yang ada di dalam organisasi. Meskipun pada penerapannya masih ada jabatan yang diduduki oleh orang yang tidak memiliki kompetensi atau tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai. Penempatan pegawai yang sesuai akan berpengaruh terhadap kualitas kinerja pegawai. Salah satu organisasi perangkat daerah yang penulis fokuskan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM berada di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Dalam pelaksanaannya sejumlah aparatur BKPSDM yang menempati jabatan tidak sesuai dengan kompetensi ini dibuktikan dengan adanya ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan jabatan yang ditempati.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan mengenai penempatan jabatan structural berbasis kompetensi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Dalam penempatan jabatan terdapat ketidaksesuaian antara bidang dengan latar pendidikannya yang dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugasnya. Penempatan pegawai semestinya dapat disesuaikan dengan latar belakang pendidikannya. Karena kemampuan seseorang berasal dari proses pembelajaran yang ditempuh selama pendidikan. Hal ini bertujuan supaya hasil kinerja dari pegawai tersebut dapat maksimal, dan dapat mengurangi kesalahan-kesalahan saat melakukan tugas dan tanggung jawabnya

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks penempatan jabatan. Penelitian pertama oleh Taufiq Kurrahman (2015) dengan judul *Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Pada UPTD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur*. Penelitian deskriptif kualitatif ini menunjukkan bahwa penempatan pegawai kurang memenuhi kualifikasi yang diharapkan, sehingga upaya peningkatan kinerja pegawai kurang maksimal. Kurang efektifnya penempatan pegawai disebabkan karena sejumlah pegawai yang ditempatkan tidak sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, baik dari segi latar belakang pendidikan maupun berdasarkan pengalaman kerja. Penelitian selanjutnya oleh Almira Devita Putri (2017) dengan judul *Penempatan Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung*. Penelitian deskriptif kualitatif ini menunjukkan bahwa penempatan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung belum terlaksana dengan tepat. Penelitian terakhir oleh Muhammad Asrul (2020) dengan judul *Pelaksanaan Mutasi Pejabat Struktural di Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar*. Penelitian

kualitatif dengan studi kasus ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mutasi pada pejabat struktural telah dilaksanakan cukup baik karena dilaksanakan dengan berdasarkan kompetensi dan pengalaman, bukan karena suasana lingkungan kerja yang buruk ataupun kejenuhan/bosan pegawai.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengenai penempatan jabatan structural berbasis kompetensi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan yakni menggunakan pendapat Larasati mengenai Penempatan Jabatan Struktural Berbasis Kompetensi.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penempatan Jabatan Struktural Berbasis Kompetensi BKPSDM Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, mengetahui dan menganalisis hambatanya dan mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi hambatan tersebut.

### **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Adapun informan penelitian terdiri Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Besar, Sekretaris BKPSDM Kabupaten Aceh Besar, Kabid Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Aceh Besar, Kabid Kepangkatan, Pensiun dan Administrasi Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Aceh Besar, Kasubbag Umum BKPSDM Kabupaten Aceh Besar, Kasubbid Perencanaan dan Pengadaan Aparatur Bidang Pembinaan dan Sistem Informasi Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Aceh Besar, dan Staff BKPSDM Kabupaten Aceh Besar. Data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi Adapun analisisnya menggunakan pendapat dari Larasati mengenai Penempatan Jabatan Struktural Berbasis Kompetensi. Untuk menganalisis teori tersebut digunakan teknik analisis data oleh Miles dan Huberman yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Setelah dianalisis penempatan jabatan structural berbasis kompetensi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan yakni menggunakan pendapat Larasati mengenai Penempatan Jabatan Struktural Berbasis Kompetensi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### 3.1. Prestasi Akademis

#### a. Pangkat dan Golongan

**Tabel 1.**  
**Daftar Pejabat Struktural BKPSDM Kabupaten Aceh Besar**

No.	Nama NIP	Gol. Ruang	Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Drs. Asnawi, M.Si 196907031990111002	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala
2.	Edi Hermansyah, ST, MT 197705271999031006	Pembina Tk.I, IV/b	Sekretaris
3.	Fazlun, SE 198008022001121002	Pembina, IV/a	Kabid Kepangkatan, Pensiun dan Administrasi Kepegawaian
4.	Zayadinur, S.STP 198210132002121001	Pembina, IV/a	Kabid Sumber Daya Manusia
5.	Aswadi, SE 196802092001121004	Penata Tk.I, III/d	Kasubbid Kepangkatan
6.	Alfianda, SH 197708062006041012	Penata Tk.I, III/d	Kasubbid Perencanaan dan Pengadaan Aparatur
7.	Liza, SH 197701052006042023	Penata Tk.I, III/d	Kasubbid Diklat Umum dan Penjurangan
8.	Teuku Irawan, SE 196911121994031005	Penata Tk.I, III/d	Kasubbid Keuangan
9.	Haidi Alfithrah, ST, M.Si 198307032006041010	Penata Tk.I, III/d	Kabid Pembinaan dan Sistem Informasi Kepegawaian
10.	Mariati, S.IP, M.Si 198803312007012001	Penata Tk.I, III/d	Kasubbid Pembinaan dan Kesejahteraan
11.	Mukhtar Luthfi, SH 197110022001121005	Penata Tk.I, III/d	Kasubbid Umum
12.	Safriadi, ST 196810282001121005	Penata Tk.I, III/d	Kasubbid Koordinasi dan Pengendalian Diklat
13.	Indri Mahlia Nofa, S.Sos 198501182008032001	Penata Tk.I, III/d	Kasubbid Mutasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
14.	Fernanda, S. STP 199302252014061001	Penata, III/c	Kasubbid Diklat Teknis dan Fungsional

Sumber: *Simpeg Pemerintah Kabupaten Aceh Besar 2021*

Salah satu persyaratan penempatan adalah pangkat dan golongan sehingga hal ini merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam apabila menduduki jabatan struktural, di BKPSDM ini telah sesuai dengan pangkat dan golongannya.

#### b. Diklat Kepemimpinan

Diklat kepemimpinan merupakan syarat dalam menduduki jabatan struktural selain ketentuan eselon dan pangkat.

**Tabel 2.**  
**Daftar Pejabat Struktural BKPSDM Kabupaten Aceh Besar yang Sudah dan Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan Tahun 2021**

No.	Nama NIP	Gol. Ruang	Jabatan	Diklat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Drs. Asnawi, M.Si 196907031990111002	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala	PIM II
2.	Edi Hermansyah, ST, MT 197705271999031006	Pembina Tk.I, IV/b	Sekretaris	PIM III
3.	Zayadinur, S.STP 198210132002121001	Pembina, IV/a	Kabid Sumber Daya Manusia	
4.	Fazlun, SE 198008022001121002	Pembina, IV/a	Kabid Kepangkatan, Pensiun dan Administrasi Kepegawaian	-
5.	Aswasdi, SE 196802092001121004	Penata Tk.I, III/d	Kasubbid Kepangkatan	-
6.	Alfianda, SH 197708062006041012	Penata Tk.I, III/d	Kasubbid Perencanaan dan Pengadaan Aparatur	-
7.	Liza, SH 197701052006042023	Penata Tk.I, III/d	Kasubbid Diklat Umum dan Penjurusan	-
8.	Teuku Irawan, SE 196911121994031005	Penata Tk.I, III/d	Kasubbag Keuangan	-
9.	Haidi Alfithrah, ST, M.Si 198307032006041010	Penata Tk.I, III/d	Kabid Pembinaan dan Sistem Informasi Kepegawaian	-
10.	Mariati, S.IP, M.Si 198803312007012001	Penata Tk.I, III/d	Kasubbid Pembinaan dan Kesejahteraan	-
11.	Mukhtar Luthfi, SH 197110022001121005	Penata Tk.I, III/d	Kasubbag Umum	-
12.	Safriadi, ST 196810282001121005	Penata Tk.I, III/d	Kasubbid Koordinasi dan Pengendalian Diklat	-
13.	Indri Mahlia Nofa, S.Sos 198501182008032001	Penata Tk.I, III/d	Kasubbid Mutasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	-
14.	Fernanda, S. STP 199302252014061001	Penata, III/c	Kasubbid Diklat Teknis dan Fungsional	PIM IV

Sumber: *Simpeg Pemerintah Kabupaten Aceh Besar 2021*

Penempatan jabatan struktural di BKPSDM Kabupaten Aceh Besar dilakukan melalui dua proses yaitu “Dik-Duk” yakni melaksanakan diklat kemudian diangkat pada jabatan struktural. Kemudian proses yang kedua yaitu “Duk-Dik” yaitu ditempatkan pada jabatan struktural terlebih dahulu baru melaksanakan diklat. Aspek syarat pangkat dan eselon sudah memenuhi. Sedangkan untuk persyaratan diklat masih ada pejabat yang menduduki jabatan struktural di BKPSDM Kabupaten Aceh Besar yang belum mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselonnya.

c. Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang pendidikan juga merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam menduduki jabatan struktural. Berikut adalah daftar pejabat struktural BKPSDM Kabupaten Aceh Besar.

**Tabel 3.**  
**Daftar Pendidikan Terakhir Pejabat Struktural BKPSDM Kabupaten Aceh Besar**

No.	Nama NIP	Jabatan	Pendidikan Umum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Drs. Asnawi, M.Si 196907031990111002	Kepala	Ilmu Ekonomi (S2)
2.	Edi Hermansyah, ST, MT 197705271999031006	Sekretaris	Teknik Sipil (S2)
3.	Fazlun, SE 198008022001121002	Kabid Kepangkatan, Pensiun dan Administrasi Kepegawaian	Ekonomi Manajemen (S1)
4.	Zayadinur, S.STP 198210132002121001	Kabid Sumber Daya Manusia	STPDN (DIV)
5.	Aswasdi, SE 196802092001121004	Kasubbid Kepangkatan	Manajemen (S1)
6.	Alfianda, SH 197708062006041012	Kasubbid Perencanaan dan Pengadaan Aparatur	Ilmu Hukum (S1)
7.	Liza, SH 197701052006042023	Kasubbid Diklat Umum dan Penjurusan	Ilmu Hukum (S1)
8.	Teuku Irawan, SE 196911121994031005	Kasubbag Keuangan	Manajemen (S1)
9.	Haidi Alfithrah, ST, M.Si 198307032006041010	Kabid Pembinaan dan Sistem Informasi Kepegawaian	Ilmu Ekonomi (S2)
10.	Mariati, S.IP, M.Si 198803312007012001	Kasubbid Pembinaan dan Kesejahteraan	Magister Ilmu Ekonomi (S2)
11.	Mukhtar Luthfi, SH 197110022001121005	Kasubbag Umum	Ilmu Hukum (S1)
12.	Safriadi, ST 196810282001121005	Kasubbid Koordinasi dan Pengendalian Diklat	Teknik Informatika (S1)

13.	Indri Mahlia Nofa, S.Sos 198501182008032001	Kasubbid Mutasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Ilmu Administrasi Negara (S1)
14.	Fernanda, S. STP 199302252014061001	Kasubbid Diklat Teknis dan Fungsional	Manajemen Pemerintahan (DIV)

Sumber: *Simpeg Pemerintah Kabupaten Aceh Besar 2021*

Berikut prestasi akademis berkaitan dengan latar belakang pendidikan para pejabat struktural yang pernah dicapai selama menjadi ASN. Proses penempatan jabatan struktural di BKPSDM belum sesuai dengan latar belakang pendidikan.

### 3.2. Pengalaman

#### a. Pegawai bekerja secara profesional

Dalam pelaksanaannya terkait penyelesaian masalah atau pekerjaan para pejabat struktural mampu menyelesaikan dengan baik. Penyelesaian masalah dimulai dengan mempelajari pengidentifikasian masalah kemudian mencari langkah-langkah yang digunakan sebagai solusi pemecahan masalah. Hal itu dapat dilakukan dengan baik oleh para pejabat struktural karena adanya pengalaman yang dimiliki.

#### b. Mampu bekerja dengan baik

Penempatan jabatan struktural di BKPSDM Kabupaten Aceh Besar, faktor pengalaman sangat diperhatikan. Pengalaman menjadikan seorang pegawai mampu bekerja dengan baik karena memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang pekerjaan tersebut. Sehingga dalam penyelesaian suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik dan professional oleh para pejabat struktural.

**Tabel 4.**

**Contoh Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Antara Jabatan Lama dan Jabatan Baru**

Nama / NIP	Jabatan Lama	Jabatan Baru
Zayadinur, S.STP 198210132002121001	Kabid. Pendidikan Umum dan Penjurangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Besar	Kabid. Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Besar
Fernanda, S.STP 199302252014061001	Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Besar	Kasubbid Diklat Teknis dan Fungsional Bidang Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber: *Keputusan Bupati Aceh Besar tentang Pengangkatan dalam Jabatan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tahun 2017 dan tahun 2020.*



Terdapat kesesuaian penempatan jabatan antara jabatan baru dengan jabatan lama. Dengan adanya kesesuaian tersebut para pegawai akan lebih mudah menjalankan tugasnya.

### 3.3. Kesehatan Fisik dan Mental

#### a. Riwayat kesehatan yang baik

Pegawai yang akan menduduki salah satu jabatan struktural harus harus memenuhi persyaratan memiliki riwayat kesehatan yang baik. Selain memiliki riwayat kesehatan yang baik, tingkat kehadiran yang tinggi serta jarang absen karena sakit juga merupakan faktor penilaian yang akan berpengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan nantinya saat menduduki jabatan struktural. Dalam pelaksanaannya ASN di BKPSDM Kabupaten Aceh Besar memiliki riwayat kesehatan yang baik.

#### b. Tingkat kehadiran tinggi

Pejabat struktural di BKPSDM memiliki tingkat kesehatan yang baik dalam mendukung pelaksanaan tugasnya masing-masing. Hal ini dapat dilihat pada rekap absensi bulan Desember Tahun 2020 di bawah ini.

**Tabel 5.**  
**Hasil Rekap Absensi BKPSDM Kabupaten Aceh Besar**

No.	Nama NIP	Jabatan	Desember 2021						
			H	S	I	C	DL	TK	JML
1.	Drs. Asnawi, M.Si 196907031990111002	Kepala	5				12		17
2.	Edi Hermansyah, ST, MT 19770527199031006	Sekretaris	7				10		17
3.	Fazlun, SE 198008022001121002	Kabid Kepangkatan, Pensiun dan Administrasi Kepegawaian	12	2			3		17
4.	Zayadinur, S.STP 198210132002121001	Kabid Sumber Daya Manusia	15				2		17
5.	Aswasdi, SE 196802092001121004	Kasubbid Kepangkatan	9				8		17
6.	Alfianda, SH 197708062006041012	Kasubbid Perencanaan dan Pengadaan Aparatur	11				6		17
7.	Liza, SH 197701052006042023	Kasubbid Diklat Umum dan Penjenjangan	11	4			2		17
8.	Teuku Irawan, SE 196911121994031005	Kasubbag Keuangan	9	2	2		3		17
9.	Haidi Alfithrah, ST, M.Si 198307032006041010	Kabid Pembinaan dan Sistem Informasi Kepegawaian	13				4		17

10.	Mariati, S.IP, M.Si 198803312007012001	Kasubbid Pembinaan dan Kesejahteraan	14				3		17
11.	Mukhtar Luthfi, SH 197110022001121005	Kasubbag Umum	12				5		17
12.	Safriadi, ST 196810282001121005	Kasubbid Koordinasi dan Pengendalian Diklat	13				4		17
13.	Indri Mahlia Nofa, S.Sos 198501182008032001	Kasubbid Mutasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	14				3		17
14.	Fernanda, S. STP 199302252014061001	Kasubbid Diklat Teknis dan Fungsional	14				3		17

Sumber: *Daftar Hadir Pegawai bulan desember tahun 2020*

### 3.4. Status Perkawinan

#### a. Kawin atau belum kawin

Status perkawinan juga merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam menduduki jabatan struktural selain ketentuan pengalaman dan prestasi akademis.

**Tabel 6.**

#### **Daftar Status Perkawinan Pejabat Struktural BKPSDM Kabupaten Aceh Besar**

No.	Nama NIP	Jabatan	Status Perkawinan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Drs. Asnawi, M.Si 196907031990111002	Kepala	Belum Kawin
2.	Edi Hermansyah, ST, MT 197705271999031006	Sekretaris	Kawin
3.	Fazlun, SE 198008022001121002	Kabid Kepangkatan, Pensiun dan Administrasi Kepegawaian	Kawin
4.	Zayadinur, S.STP 198210132002121001	Kabid Sumber Daya Manusia	Kawin
5.	Aswasdi, SE 196802092001121004	Kasubbid Kepangkatan	Kawin
6.	Alfianda, SH 197708062006041012	Kasubbid Perencanaan dan Pengadaan Aparatur	Kawin
7.	Liza, SH 197701052006042023	Kasubbid Diklat Umum dan Penjenjangan	Kawin
8.	Teuku Irawan, SE 196911121994031005	Kasubbag Keuangan	Kawin

9.	Haidi Alfithrah, ST, M.Si 198307032006041010	Kabid Pembinaan dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kawin
10.	Mariati, S.IP, M.Si 198803312007012001	Kasubbid Pembinaan dan Kesejahteraan	Kawin
11.	Mukhtar Luthfi, SH 197110022001121005	Kasubbag Umum	Kawin
12.	Safriadi, ST 196810282001121005	Kasubbid Koordinasi dan Pengendalian Diklat	Kawin
13.	Indri Mahlia Nofa, S.Sos 198501182008032001	Kasubbid Mutasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kawin
14.	Fernanda, S. STP 199302252014061001	Kasubbid Diklat Teknis dan Fungsional	Kawin

Sumber: *Simpeg Pemerintah Kabupaten Aceh Besar 2021*

Status perkawinan dijadikan sumber oleh pimpinan untuk mengambil keputusan dalam rangka untuk penempatan pegawai, mengetahui status perkawinan pegawai adalah hal penting untuk kepentingan kepegawaian juga menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam penempatan pegawai. Dengan mengetahui status perkawinannya maka akan dapat ditentukan, dimana seseorang akan ditempatkan.

### 3.5. Usia

#### a. Kriteria usia dalam penempatan

Usia juga merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam menduduki jabatan struktural.

**Tabel 7.**

#### **Daftar Usia Pejabat Struktural di BKPSDM Kabupaten Aceh Besar**

No.	Nama NIP	Jabatan	Usia
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Drs. Asnawi, M.Si 196907031990111002	Kepala	52 Tahun
2.	Edi Hermansyah, ST, MT 197705271999031006	Sekretaris	44 Tahun
3.	Fazlun, SE 198008022001121002	Kabid Kepangkatan, Pensiun dan Administrasi Kepegawaian	41 Tahun
4.	Zayadinur, S.STP 198210132002121001	Kabid Sumber Daya Manusia	39 Tahun
5.	Aswadi, SE 196802092001121004	Kasubbid Kepangkatan	53 Tahun

6.	Alfianda, SH 197708062006041012	Kasubbid Perencanaan dan Pengadaan Aparatur	44 Tahun
7.	Liza, SH 197701052006042023	Kasubbid Diklat Umum dan Penjurangan	44 Tahun
8.	Teuku Irawan, SE 196911121994031005	Kasubbag Keuangan	52 Tahun
9.	Haidi Alfithrah, ST, M.Si 198307032006041010	Kabid Pembinaan dan Sistem Informasi Kepegawaian	38 Tahun
10.	Mariati, S.IP, M.Si 198803312007012001	Kasubbid Pembinaan dan Kesejahteraan	33 Tahun
11.	Mukhtar Luthfi, SH 197110022001121005	Kasubbag Umum	50 Tahun
12.	Safriadi, ST 196810282001121005	Kasubbid Koordinasi dan Pengendalian Diklat	53 Tahun
13.	Indri Mahlia Nofa, S.Sos 198501182008032001	Kasubbid Mutasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	36 Tahun
14.	Fernanda, S. STP 199302252014061001	Kasubbid Diklat Teknis dan Fungsional	28 Tahun

Sumber: *Simpeg Pemerintah Kabupaten Aceh Besar 2021*

Dalam menempatkan pegawai dalam suatu jabatan, faktor usia pegawai yang lulus seleksi perlu dipertimbangkan seperlunya. Hal ini untuk menghindari rendahnya produktifitas yang dihasilkan oleh pegawai yang bersangkutan. Pegawai yang umurnya sudah tua, sebaiknya ditempatkan pada pekerjaan yang tidak membutuhkan tenaga fisik dan tanggung jawab yang berat, cukup diberikan pekerjaan yang seimbang dengan kondisi fisiknya begitu juga sebaliknya.

Kesesuaian antara Faktor Usia dengan jabatan yang dipangku merupakan hal yang perlu di perhatikan, mengingat faktor usia menjadi pertimbangan dalam menduduki suatu jabatan struktural.

### **3.6. Hambatan dalam Penempatan Jabatan Struktural Berbasis Kompetensi**

#### **a. Kurangnya Pegawai Yang Memiliki Kompetensi Di Bidang Kepegawaian**

Penempatan pegawai pada jabatan struktural di BKPSDM Kabupaten Aceh Besar selalu diusahakan berjalan secara maksimal sesuai kompetensi dari pegawai. Namun dalam pelaksanaannya memiliki berbagai hambatan yang menjadikan proses pelaksanaannya tidak berjalan secara maksimal. Salah satu faktor penghambat yang dihadapi dalam proses pelaksanaan penempatan pejabat struktural di BKPSDM Kabupaten Aceh Besar adalah kurangnya pegawai yang memiliki kompetensi di bidang kepegawaian. Hal ini dikarenakan masih banyak pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan kepegawaian yang kurang sehingga kurang selaras dengan jabatan yang diemban. Akibat kurangnya

pegawai yang memiliki kompetensi pada spesifikasi bidang ilmu kepegawian, terdapat beberapa jabatan struktural yang diisi oleh pegawai yang tidak sesuai antara jabatan dengan spesifikasi ilmunya.

**b. Keterbatasan Anggaran dalam Penyelenggaraan Kebutuhan Diklat**

Terdapat beberapa pejabat struktural belum mengikuti diklat sesuai dengan jabatannya. Sebagian dari pejabat struktural sudah mengikuti diklat kepemimpinan, namun untuk pelaksanaan diklat teknis masih sulit diselenggarakan. Hal ini dikarenakan masih terdapat kendala yaitu memiliki keterbatasan dalam anggaran.

**3.7. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Dalam Penempatan Jabatan Struktural Berbasis Kompetensi**

**a. Meningkatkan Kompetensi Pegawai Melalui Pendidikan Dan Pelatihan**

Pendidikan dan pelatihan (Diklat) merupakan kebutuhan serta hak yang harus diberikan bagi pegawai. Tujuan dilaksanakannya adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kompetensi pegawai di BKPSDM Kabupaten Aceh Besar adalah dengan melaksanakan kegiatan Diklat Kepemimpinan maupun Diklat Teknis bagi para pegawai. Selain dilaksanakan diklat kepemimpinan bagi para pejabat struktural pelaksanaan diklat teknis juga diperlukan dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis sesuai bidangnya.

**b. Pengoptimalan Pengawasan Dalam Rangka Pembinaan Pegawai**

Pengawasan secara langsung dari pimpinan kepada bawahannya merupakan upaya yang cukup mempengaruhi dalam rangka pembinaan pegawai. Upaya ini dilakukan agar pegawai terutama pejabat struktural dapat bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dalam pelaksanaannya pejabat struktural di BKPSDM Kabupaten Aceh Besar sudah mengetahui tugas pokok dan fungsinya masing-masing namun harus terus melaksanakan pengawasan dalam rangka pembinaan pegawai.

**3.8. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penempatan jabatan merupakan kegiatan dalam rangka memberikan kesempatan kepada pegawai untuk bekerja sesuai dengan kompetensinya atau kesesuaian antara bidang yang ditempat dengan latar belakang baik dari pengalaman maupun dari pendidikannya. Dalam penelitian ini penempatan jabatan terutama yakni jabatan structural didasarkan atas kompetensi yang harus dimiliki yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Dalam implementasi penempatan jabatan structural yang dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Aceh Besar telah berjalan sesuai dengan aturan. Tidak seperti halnya yang terjadi pada UPTD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur oleh penelitian Taufiq Kurrahman (2015) karena pegawai yang kurang kualifikasi untuk mendapatkan jabatan structural tersebut.

Dalam pelaksanaannya BKPSDM Kabupaten Aceh Besar yang telah sesuai dengan aturan dan memenuhi dimensi yang didasarkan dalam penelitian ini tidak serta merta berjalan dengan lancar melainkan ada saja kendala yang terjadi selama pelaksanaannya yakni seperti kurangnya pegawai yang berkompentensi khususnya di bidang Kepegawaian karena pada dasarnya BKPSDM sendiri iala

Badan yang mengurus keseluruhan pegawai dalam hal kepegawaiannya maka dibutuhkan pegawai yang memiliki kompetensi dibidang tersebut. Serta pada keterbatasan anggaran yang dimiliki BKPSDM Kabupaten Aceh Besar. Kendala tersebut juga yang ditemukan dalam penelitian Almira Devita (2017) yang membuat penempatan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung belum terlaksana dengan baik dan tepat.

Penempatan jabatan berdasar kompetensi ini sebenarnya memiliki dampak positif bagi setiap pegawai. Pegawai harus gigih dalam memperjuangkan apabila adanya peluang untuk mengisi jabatan, namun mereka harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan terutama yakni pendidikan dan pelatihan kepemimpinan maupun teknis. Pelaksanaan penempatan jabatan ini hampir sama dengan pelaksanaan mutase yang dilakukan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Takalar pada penelitian Muhammad Asrul (2020) dimana pelaksanaan mutase tersebut telah bejalan dengan baik berdasar juga kompetensi seperti pada penelitian di BKPSD Kabupaten Aceh Besar ini.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan mengenai penempatan jabatan structural berbasis kompetensi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh telah terlaksana dengan baik berdasarkan dimensi pengalaman, kesehatan fisik dan mental, status perkawinan dan usia. Namun pada dimensi prestasi akademis masih belum sesuai. Adapun hambatannya kurangnya pegawai yang memiliki kompetensi di bidang kepegawaian dan keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan diklat. Upaya yang dilakukan ialah meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan dan pengoptimalan pengawasan dalam rangka pembinaan pegawai untuk digunakan dalam penetapan perencanaan kebutuhan pegawai.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada lokus yang telah ditetapkan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat dari Larasati mengenai Penempatan Jabatan Struktural Berbasis Kompetensi.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa mengenai penempatan jabatan structural berbasis kompetensi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Besae Provinsi Aceh beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amalia R. 2017. *Penempatan dan Pengembangan Pegawai*, Buku Literatur.
- Arikunto, S. 2019. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Cresswell, J.W. 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sedarmayanti. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia; Reformasi Birokasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT Refika Aditama
- Effendy, K. 2014. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Indra Prahasta
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Larasati, S. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Deepublish
- Nazir. 2014. *Metode Penelitian (edisi kesepuluh)*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Siagian. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Simangunsong, F. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*
- Soehartono, I. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Yusuf, M. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Runtuwu, Hiskia (2015) *Pengaruh Disiplin, Penempatan dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado*, Jurnal EMBA. Jurnal Vol. 3, No.3
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN
- Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BKPSDM